Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) *ISSN 2622-3740 (Online)*
Vol 3, No. 3, April 2021: 853-861, DOI: 10.34007/jehss.v3i3.414

Ulama dalam Politik Pemilu pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017

Ulema in Election Politics in the DKI Jakarta Governor Election of 2017

Afif Ginanjar [1], Ari Ganjar Herdiansah [2] & R. Widya Setiabudi Sumadinata [3]

[1]Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Padjadjaran, Indonesia
[2]Departemen Ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran, Indonesia
[3]Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Diterima: 28 Oktober 2020; Direview: 04 November 2020; Diterima: 28 Januari 2021
Corresponding Author: afif18004@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis faktor kepentingan pada keterlibatan ulama dalam politik pemilu dengan mengambil kasus dukungan Forum Ulama dan Habaib (*FUHAB*) terhadap Anies-Sandi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan para tokoh *fuhab*, tim sukses Anies-Sani, politikus, dan akademisi serta dilengkapi kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kepentingan yang dirangkai dalam bentuk ekonomi umat yang dilandasi identitas. Mereka mempersepsikan secara kuat beberapa program yang ditawarkan Anies-Sandi sebagai pro umat yang direpresentasikan oleh kalangan miskin perkotaan, seperti menghentikan reklamasi. Dalam tatanan praktis, dukungan politik fuhabbersifat cair karena di putaran awal mereka menyokong Agus-Silvi. Bentuk kerja politik yang mereka lakukan antara lain dengan memanfaatkan pengajian dan khutbah jum'at serta mengamankan suara di tingkat bawah dalam proses pemungutan suara. Setelah Anies-Sandi menang, Forum Ulama Habaib (*Fuhab*), sebagaimana organisasi lainnya kemudian mendapatkan dana hibah dari pemerintah dan ini menunjukkan bahwa organisasi *civil society* memiliki posisi tawar politik dalam pemilu yang berguna bagi kepentingan mereka.
Kata Kunci: *Civil Society*, Pilkada, Kepentingan, Ulama, Politik

Abstract

This study analyzes the factors of interest in the involvement of ulama in electoral politics by taking the case of the support of the Ulama and Habaib Forum (FUHAB) against Anies-Sandi in the DKI Jakarta Regional Head Election (Pilkada) 2017. The research method used is qualitative with the technique of collecting interview data with the FUHAB figures, Anies-Sani's success team, politicians, and academics as well as a literature review. The results showed that the dimensions of the interests which were arranged in the form of the economy of the ummah were based on identity. They strongly perceive some of the programs offered by Anies-Sandi as pro-people represented by the urban poor, such as stopping reclamation. In a practical manner, the political support of the FUHAB was fluid because in the early rounds they supported Agus-Silvi. The forms of their political work included using recitation and khutbah jum'at as well as securing votes at lower levels in the voting process. After Anies-Sandi won, the Habaib Ulama Forum (Fuhab), like other organizations, then received grant funds from the government and this shows that civil society organizations have a political bargaining position in elections which is useful for their interests.
Keywords*: Civil Society; Pilkada; Interests, Ulama; Politics*

How to cite**:** Ginanjar, A. Herdiansah, A.G. & Sumadinata, R.W.S. (2021), Ulama dalam Politik Pemilu pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017**,** *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(3): 853-861*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

PENDAHULUAN

Persoalan agama menjadi salah satu komponen strategis dalam pemilihan umum Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum daerah. Relasi terkait agama dan politik menjadi isu spesifik politik lokal, seperti mengungkap isu agama, isu identitas, sentimen agama, ras, suku, masyarakat lokal dan etnis minoritas. Perkembangan sistem demokrasi yang direformasi merupakan bagian dari refleksi perubahan paradigma dan kemajuan yang luar biasa (Ramadlan, 2018).

Dalam konteks kekuasaan politik negara, hubungan ulama dan politik biasanya ditentukan sebagai kekuatan politik Islam. Hubungan Islam dan politik Indonesia memang memiliki tradisi panjang. Asal muasalnya dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, ketika Islam pertama kali diperkenalkan dan disebarkan di Indonesia. Dalam proses sejarah Islam, Islam telah melakukan dialog yang bermakna dengan realitas sosial budaya dan politik lokal serta berpartisipasi dalam aktivitas politik. Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah politik negara, meskipun tidak bergantung pada Islam itu sendiri sebagai agama politik (Faridl, 2001).

Selama ini, keterlibatan ulama dalam praktik politik telah menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, beberapa di antaranya telah melegalkan ulama, sementara yang lain sangat menentang partisipasi ulama dalam politik (Saidi, 2016). Kelompok pertama meyakini bahwa ulama bagaimanapun juga adalah entitas dengan hak dan ambisi politik, seperti halnya warga negara lainnya, sedangkan kelompok kedua mengkritik keras anggapan bahwa keikutsertaan ulama dalam politik akan membawa kerugian yang lebih besar berdasarkan anggapan bahwa Politik akan merongrong otoritas ulama (Saidi, 2016). Namun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa ulama ikut serta dalam politik elektoral Indonesia berupa partisipasi langsung maupun tidak langsung.

Anggota Forum Ulama dan Habaib (FUHAB) Ulama dan habaib mengumumkan deklarasi mereka untuk pemilihan putaran kedua DKI Jakarta 2017 Anies-Sandi. FUHAB adalah organisasi yang memiliki visi dan misinya mempersatukan umat Islam di Jakarta untuk kemudian mengikuti kontes pemilu. Ini merupakan fenomena yang sangat menarik yang perlu dikaji karena adanya keterlibatan lembaga agama (dalam hal ini elite agama) dalam pemilu. Sebagai sebuah organisasi, selain memperhatikan dan mengajak masyarakat untuk menjadi umat Islam yang baik, FUHAB juga membimbing hadirin, berpartisipasi dalam kegiatan politik dan memberikan masukan bagi pemerintah untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan. Hubungan ulama di Indonesia dan politik perlu secara khusus diangkat dari hubungan antara Islam dan politik. Karena hal ini didasarkan pada fakta bahwa ulama mewakili citra seorang pemimpin Islam (Faridl, 2001). Fuhab ikut dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur karena berjuang agar Jakarta tidak dipimpin oleh para pemimpin Muslim.

Studi ini mengambil kasus dukungan dari ulama pada Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017. Dalam penelitian ini kelompok ulama yang diteliti adalah Forum Ulama Habaib atau disingkat FUHAB. Kelompok ulama ini dibentuk berdasarkan rasa kebersamaan antara Ulama dan habaib di Jakarta. Selain itu, pembentukan FUHAB dilandasi nilai-nilai menjaga jati diri, etika dan budaya Jakarta.

Penelitian ini menggunakan teori *civil society* dan kelompok kepentingan/*interest group* sebagai pisau analisisnya. Terkait kajian yang relevan dengan penelitian ini salah satunya oleh Nawab (2009) dalam tulisannya yang berjudul: *"The Ulama in Pakistani Politics"*. Dia menguraikan Ulama adalah tokoh penting dalam masyarakat Muslim. Di sebagian benua India, pengaruh mereka telah melampaui ranah sosial-keagamaan untuk memasukkan ranah politik juga. Penelitiannya merupakan upaya untuk meneliti peran ulama dalam politik Pakistan. Ia juga berupaya membangun lintasan pengaruh masa depan mereka dalam politik Pakistan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Zamroni (2007) dengan judul Juragan, Kyai dan Politik di Madura. Penelitian ini berfokus pada mendeskripsikan juragan, Kyai dan politik di Madura, keberadaan elite lokal selalu diidentifikasi dengan banyak pengaruh sosial yang mereka miliki dalam banyak aspek. Mereka mencoba menginvestasikan modalnya dengan berpartisipasi di partai politik tertentu untuk menduduki posisi strategis baik di desa atau level daerah. Membangun koneksi dengan elite lokal menjadi salah satu yang politis untuk memperkuat struktural posisi di masyarakat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Lutz, *et. all* , 2018) dengan judul *Interest Group Support and Electoral Success in the Swiss Elections of 2015. A Candidate Survey Analysis.* Penelitian ini hanya berfokus pada politisi, partai dan kelompok kepentingan sangat terhubung di Swiss. Penelitian ini mengisi kekosongan dengan berfokus pada pertanyaan yang sejauh ini diabaikan yaitu dampak dari dukungan kelompok kepentingan pada keberhasilan kandidat pemilihan.

Dengan mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan sifat yang menghancurkan hubungan diri antara kandidat individu dan banyak kelompok kepentingan dalam pemilihan nasional Swiss 2015. Didukung oleh banyak kelompok pendukung dan menduduki posisi terdepan secara positif berkorelasi dengan suara preferensi yang lebih besar, sementara kontribusi keuangan tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Akan tetapi, ada variasi bagaimana dukungan oleh dan posisi terkemuka dalam hal kelompok kepentingan untuk calon dari pihak yang berbeda tergantung pada jenis kelompok kepentingan. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh (Naik, 2016) dengan judul *Political Party Interest Group Relationship A Study in Uttar Kannada District Karnataka State*. Dalam penelitiannya memberikan analisis umum pertama tentang hubungan kelompok bagian dalam demokrasi liberal. Studi ini menjelaskan berbagai elemen dan menilai pentingnya hubungan kelompok partai dalam demokrasi liberal individu dan tidak ada studi komparatif tentang adanya hubungan di seluruh distrik. Jurnal ini berusaha untuk memberikan pemahaman holistik tentang hubungan kelompok partai dalam demokrasi individu.

Organisasi ini menjadi salah satu kelompok kepentingan yang mendeklarasikan dukungan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Anies-Sandi pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 (Ridhoi, 2017). Menyaksikan Pilkada DKI Jakarta 2017, khususnya masyarakat DKI Jakarta, telah membangkitkan minat masyarakat yang besar, yang menjadikan DKI Jakarta daya tarik yang kuat bagi semua peserta pemilu. Selain itu, jika seseorang yang pernah menjabat sebagai Gubernur di DKI Jakarta dan pernah menjabat sebagai gubernur menjadi bagian dari masyarakat, maka popularitas dan terobosan gubernur tersebut akan meningkatkan rating dan menjadi nilai tambah di mata masyarakat. Apalagi jika sudah menjadi pemimpin ibu kota, terkadang akan dijadikan batu loncatan untuk mencalonkan presiden. Semenjak terjadinya penuduhan penistaan agama kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kemunculan politik identitas agama pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendapatkan momentumnya (Herdiansah, 2017).

Adapun yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada keterlibatan yang dilakukan oleh kelompok kepentingan yang mendukung calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada DKI Jakarta serta melihat kepentingannya, sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu melihat dampak dari dukungan kelompok kepentingan kepada kandidat. Ulama dengan karismatiknya mampu menggerakan kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan (Wafa, 2012). Ulama tidak hanya berkecimpung dalam dunia keagamaan, akan tetapi mereka sebagai ulama yang menelaah pembentuk ruang kuasa sosial-politik dalam kemasyarakatan. Ditinjau dari segi ilmu politik, ulama merupakan aktor politik yang mempunyai sumber daya politik berbasis karismatik dan tradisional yang memungkinkan ulama membentuk sikap atau preferensi politis tertentu dalam struktur sosial masyarakat di sekitarnya (Mulkhan, 2009).

Kelompok kepentingan menimbulkan kontroversi pada sebagian besar yang berpusat pada pengaruh mereka dalam demokrasi dan distribusi kekuasaan politik (Heywood, 2014). Kalangan pluralis melihat adanya kelompok kepentingan sebagai salah satu penyusun utama dari demokrasi yaitu sebagai penyebar kekuasaan, pendidikan politik, dan meningkatkan partisipasi. Sementara kalangan elitis memandang bahwa kelompok kepentingan melemahkan atau merongrong proses demokrasi karena memperbesar kesenjangan politik, kekuasaan yang tidak absah, dan merongrong demokrasi perwakilan (Heywood, 2014). Kelompok kepentingan tidak terlibat secara langsung dalam pemilu atau terorganisasi sebagai partai politik, kelompok kepentingan memiliki cukup kekuatan politik untuk mempengaruhi berjalannya sistem politik suatu negara. Pengaruh yang dipegang beberapa kelompok kepentingan dapat mengubah jalannya suatu pemilu, dalam mendukung satu kandidat dan atau menentang kandidat lainnya, dan para kandidat akan memanfaatkan dukungan berbagai kelompok sesuai dengan *platform* yang mereka ajukan dan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.

perjuangkan. Hadirnya ulama dan habaib dalam kancah pemilu tentunya ada satu gagasan yang diperjuangkan oleh mereka.

Dalam pemilihan umum (pemilu), pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan calon anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), para elit agama menjadi bagian penting dari karisma dan penghormatan mereka di masyarakat. Daya tarik hati orang. Dengan semakin berkembangnnya ilmu dan pengetahuan, maka peran ulama diperluas ke berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sosial yang meliputi berbagai kegiatan nyata untuk membantu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu dimana menjalankan tugasnya dan fungsinya ulama dibagi kedalam dua jenis. *Pertama* adalah dakwah melalui lisan seperti ceramah, tablig dan pidato. *Kedua* adalah dakwah melalui perbuatan dengan memberikan contoh baik dalam setiap aspek kehidupan (Fadli, 2011).

Dari uraian di atas, hal yang menarik dari fenomena Forum Ulama dan Habaib yang berperan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 adalah adanya keterlibatan ulama dan habaib di dalamnya. Keterlibatan ulama dan habaib ini menarik diteliti, sebab kedua elite agama ini menjadi sangat sentral dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Melihat dari visi dan misi terbentuknya FUHAB yaitu untuk menyatukan masyarakat Islam di Jakarta, akan tetapi keberpihakan mereka pada politik praktis dalam pilkada DKI tahun 2017 menjadi bertolak belakang dengan visi dan misinya. Sehingga perlu kiranya peneliti meneliti FUHAB lebih dalam menggunakan teori *civil society* dan kelompok kepentingan/*interest group*.

Dukungan yang dilakukannya merupakan salah perjuangan untuk mengawal proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya. Alasan ini menjadi dasar peneliti untuk *civil society organitation* menganalisis kelompok kepentingan yang membentuk gerakan untuk andil dalam kontestasi politik praktis sehingga melakukan dukungan pada calon.

Peneliti menemukan fenomena bahwa keberpihakkan FUHAB mendukung Anies-Sandi yaitu dengan tujuan agar menjadikan Jakarta lebih sejahtera dengan melakukan program-program yang menyejahterakan warga Jakarta. Fenomena lain peneliti menemukan bahwa FUHAB mengadakan audiensi dengan Anies-Sandi pasca terpilihnya sebagai gubernur dan wakil gubernur dengan membahas pengajian rutinan di rumah dinas. Selain itu juga FUHAB meminta agar gubernur dan wakil gubernur diharapkan menata lalulintas dan kebanjiran di DKI Jakarta.

Keterlibatan yang dilakukan dalam usaha memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka dukung, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. *Pertama,* dengan melakukan pembentukan opini bahwa memilih selain seorang *muslim* adalah haram. *Kedua,* dengan pergerakan massa. Sebagai seseorang yang memiliki kemampuan berdakwah, para ulama menggunakan dakwah untuk memobilisasi massa pengikutnya. *Ketiga,* selain berperan dalam membentuk opini dan menggerakan massa, para ulama juga melakukan peran penting dalam proses meraih kemenangan bagi pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakara Tahun 2017.

Civil society merupakan alam sosial yang sukarela, terbuka dan berdiri sendiri bersifat otonom dari negara dan terikat oleh aturan hukum aturan seperangkat aturan bersama (Diamond, 1999), CSO ini secara umum berdasar bahwa ini lembaga terdiri dari warga yang bertindak bersama dalam lingkup publik untuk mencurahkan kepentingan mereka, untuk memengaruhi kebijakan, meneliti dan memeriksa pelakasanaan kekuasaan negara. Dalam sudut pandang pemilihan umum CSO sangat diakui memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perdamaian, mampu berbicara dengan partai tanpa kehilangan kredibilitas serta mampu berurusan langsung dengan penduduk (Orjuela, 2003).

Civil society menjelma menjadi Kelompok kepentingan *(interest group)* menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ataupun Pemilihan Presiden (Pilpres) (Perdana, 2009). Kelompok kepentingan (*interest group*) diartikan sebagai *a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests* (Benditt, 1975). Tujuan kelompok kepentingan ini hanya berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya. Maka jika dibandingkan dengan fungsi partai politik agak berbeda dan lebih sempit. Giovanni Sartori mendefinisikan bahwa partai politik sebagai, *any political group that presents at elections,*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

and is capable of placing through elections, and candidates for public office (Sartori, 1984). Dengan demikian partai politik memiliki tujuan untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan atau meraih jabatan-jabatan dalam pemerintahan.

Dalam pandangannya seorang ahli ilmu politik Indonesia Muhammad As Hikam memandang bahwa *civil society* merupakan wilayah kehidupan sosial yang menjamin berlangsungnya tindakan dan refleksi mandiri, tidak berada dalam kungkungan kondisi kehidupan material, tidak terserap dalam jaringan kelembagaan politik resmi, dan mengandung transaksi komunikasi yang bebas dengan masyarakat (Hikam, 1996).

Diamon menjelaskan *Civil Society* adalah organisasi atau asosiasi yang ada di luar negara, bersifat bebas dan independen, memiliki karakter sekunder daripada primer, baik organiasai yang formal ataupun informal yang dapat dikategorikan sebagai berikut (Suharko, 2005):

1. Bersifat ekonomis: asosiasi dan jaringan produktif dan komersial;
2. Bersifat kultural: institusi dan asosiasi religius, etnis, komunal dan asosiasi lain yang mempertahankan hak-hak, nilai-nilai, keyakinan dan simbol kolektif;
3. Bersifat informasional dan edukasional: organisasi-organisasi yang memiliki bidang gerak pada produksi dan diseminasi (baik untuk tujuan perolehan profit atau tidak) pengetahuan, ide, berita dan informasi publik;
4. Berkaitan dengan kepentingan (*interest*): kelompok-kelompok yang berupaya memajukan atau mempertahankan kepentingan fungsional atau material bersama untuk para anggotanya;
5. Berkaitan dengan pembangunan (*developmental*): organisasi yang mengumpulkan sumberaya dan bakat-bakat individual untuk memperbaiki infrastruktur, kelembagaan dan kualitas kehidupan komunitas;
6. Berorientasi isu (*issue-oriented*): gerakan untuk perlindungan lingkungan, reformasi agraria, perlindungan konsumen, hak-hak perempuan, etnis minoritas, kelompok adat, kaum *difable*, dan korban-korban lain dari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan;
7. Berorientasi *civic*: kelompok-kelompok non partisan yang berupaya memperbaiki sistem politik dan membuatnya lebih demokratis, seperti kelompok-kelompok yang bekerja untuk HAM, pendidikan dan mobilisasi pemilih, pemantaun pemilu, pengungkapan praktik-praktek korupsi;
8. Berhubungan dengan *the ideological marketplace*, aliran informasi dan ide-ide yang mencakup kelompok-kelompok yang mengevaluasi dan mengkritisi negara, seperti media massa yang independen, dan area-area yang lebih luas dari aktivitas kultural dan intelektual yang otonom, seperti universitas, kelompok pemikir, kelompok teater.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Afrizal, 2014). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *field reserch*. Metode penelitian kualitatif sebagai halnya prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif informasi yang mendalam untuk mengetahui dan menganalisis tentang *civil society* dan politik pemilu terhadap peran Forum Ulama Habib Jakarta Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Informan di luar Forum Ulama Habaib (Fuhab) yaitu Anggota Dewan Legislaif dari Partai Gerindra. Penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta selama satu bulan yaitu bulan september 2020. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan alasan pertama, menggunakan metode penelitian kualitatif karena sesuai dengan sifat dan masalah serta tujuan yang ingin diperoleh dengan berusaha memperoleh data analisis deskriptif mengenai civil society dan politik pemilu dengan studi kasus Forum Ulama Habib pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Penentuan informan menggunakan teknik *snowball* dan *purposive*. *Snowball* digunakan peneliti untuk menggali data yang dibutuhkan yang jumlah data sedikit dan belum mampu memberikan jumlah data yang lengkap (Sugiyono, 2007). Purposive digunakan peneliti yaitu untuk tujuan mendalami informasi yang tidak didapatkan ketika menggali data serta berdasarkan pada kemampuan mereka memberikan kontribusi pada pemahaman tentang fenomena yang diteliti (Emzir, 2014).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.

Dalam pengambilan data informan, informan yang diwawancarai oleh peneliti yaitu; SM sebagai ketua umum, YA sebagai sekretaris umum, TM sebagai sekretaris II, AAD sebagai sekretaris III, RM sebagai ketua Fuhab Jakarta Timur, dan S sebagai anggota legislatif dari partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Forum Ulama Habaib Jakarta adalah sebuah perkumpulan yang di dalamnya terdiri dari para ulama dan habaib yang ada di Jakarta. Fuhab menjadi sebuah organisasi resmi yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta. Asal mula Forum Ulama Habaib Jakarta yaitu Forum Ulama Betawi yang hanya mengerucut kepada komunitas kesukuannya lebih kuat ke Betawi serta anggotanya lebih sempit karena komunitas Betawi di Jakarta sudah mulai berkurang. Seperti yang terjadi di Bantaran Kali yang terdampak pelebaran dan akhirnya pindah ke Depok dan Bogor. Maka untuk menjangkau lebih luas Fuhab Betawi diganti menjadi FuhabJakarta. Sehingga orang yang dari luar Betawi boleh memimpin Fuhab Jakarta. Para anggota dan pengurusnya terdiri dari kalangan ulama dan habaib dari berbagai organisasi, ormas-ormas yang lain seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI. Organisasi Forum Ulama Habaib (FUHAB) Jakarta di dirikan pada tanggal 19 November 2015 bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1437 Hijriah berkedudukan di Jakarta sebagai Ibu Kota Jakarta Negara Republik Indonesia. Fuhab didirikan oleh lima orang yaitu: 1) H. M. Nuri Thahir; 2) H. Asmuni Muchtar; 3) H. Ady Mansur; 4) HUD Muhammad Al-Bagir A; 5) Drs. Ali Sahabudin.

Azas Forum Ulama Habaib (Fuhab) berazaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Aqidah Fuhabberaqidah Islam *Ahlusunnah wa al-Jama'ah* serta berlandasan moral dan jiwa mempunyai nilai-nilai religius yang telah lama terkandung dalam masyarakat Jakarta yang wajib dilestarikan, dihayati dan diamalkan oleh setiap pribadi masyarakat Jakarta dalam kehidupan sehari-hari yaitu: (1) Bertaqwa kepada Allah S.W.T.; (2) *Jihad Fisabilillah* (patriotisme, pantang menyerah dan rela berkorban; (3) Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; (4) Membina dan memupuk rasa persaudaraan antar sesama masyarakat Jakarta dengan masyarakat lain; (5) Berjiwa kepeloporan; (6) Nasionalisme; (7) Gotong royong tanpa pamrih. Forum Ulama Habaib sebagai organisasi yang bersifat sosial keagamaan, edukatif dan mandiri serta tidak berpihak atau berafiliasi terhadap organisasi kekuatan politik manapun.

Ada tiga fungsi Forum Ulama Habaib Jakarta, yaitu: *Pertama,* sebagai wadah pembinaan, kaderisasi dan memperjuangkan umat Islam dalam kehidupan yang layak ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, golongan dan agama. *Kedua,* sebagai wadah umat Islam baik perorangan maupun kelompok dalam menanggapi aliran-aliran yang berkembang di dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. *Ketiga,* sebagai wadah yang menjembatani hubungan antara kepentingan ulama, umaro dan sebagainya. Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Forum Ulama Habaib yaitu; (1) Melaksanakan *Amar ma'ruf nahi munkar*; (2) Menghimpun dan mengembangkan potensi Sumber Daya Muslim Indonesia khususnya masyarakat Jakarta dan sekitarnya, terutama SDM Ulama Habaib agar dapat menjadi pelaku pembangunan yang tangguh pada wilayah masing-masing; (3) Memelihara, membina dan meningkatkan persatuan dan kesatuan umat Islam Indonesia khususnya Alim Ulama Habaib di Jakarta dan sekitarnya; (4) Menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya Islam yang *rahmatan lil 'alamin*; (5) Berperan secara aktif bersama pemerintah DKI Jakarta dalam mencari penyelesaian dan mengantisipasi berbagai masalah yang berkembang khususnya di DKI Jakarta; (6) Turut berperan aktif dalam proses pembangunan Nasional khususnya di Jakarta dengan mengerahkan segenap potensi umat Islam Jakarta dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat khususnya umat Islam.

Berbagai aktivitas yang telah dilakukan oleh Forum Ulama Habaib sebagai *civil society* dan menjadi kelompok kepentingan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017. *Civil society* adalah munculnya partisipasi yang aktif dari semua warga negara baik yang tergabung dalam perkumpulan, organisasi atau kelompok yang lain dan akan membentuk karakter demokratis di lembaga tersebut (W. Foley *et al.*, 2003).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Dalam konteks pemilu *civil society* juga mempunyai pemikiran tidak hanya pengawal kebijakan dari luar, akan tetapi sebagai cso juga berpikir untuk menjadi bagian dari proses pembuat kebijakan. Maka cso bergabung atau menjadi aktivis partai politik di arena pertarungan politik (Kariyadi & Samadhi, 2008). Fuhab mendukung Anies-Sandi merupakan bagian pengawalan dari luar, sehingga apabila Anies-Sandi terpilih dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 senantiasa akan mengawal kebijakan. Namun kebijakan ini hanya dapat dilakukan dari luar. Tidak seperti halnya partai politik yang dapat membuat kebijakan dari dalam. Pasca terpilihnya Anies-Sandi Forum Ulama Habaib (Fuhab*)* melakukan audiensi untuk senantiasa mengawal kebijakan-kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur. Salah satunya melakukan audiensi. Dalam kegiatan tersebut Fuhab meminta agar aliran-aliran sungai dan kemacetan jalan segera dibenahi (Putra, 2017). Dalam audiensinya itu Fuhabmeminta agar 13 sungai di Jakarta dilakukan pengerukan sedalam 10 meter.

Keterlibatan Forum Ulama Habaib dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2017 selain mendeklarasikan dukungan kepada Anies-Sandi dengan tujuan untuk melakukan lobi dan advokasi untuk mendorong isu-isu yang mereka inginkan. Advokasi yang dilakukan tentunya yang akan menuju kepada kebijakan yang positif untuk kemajuan Jakarta, seperti yang telah dilakukan Fuhabpasca terpilihnya Anies-Sandi Ditambah lagi dengan adanya kasus tuduhan penistaan agama yang dilakukan calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Herdiansah, 2017). Maka selain mendukung Anies-Sandi Fuhabjuga mengawal persoalan aqidah dan idelogi Islam dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pengawalan masyarakat agar memilih pemilih yang beragama Islam menjadi bagian *point* utama Fuhabdalam mendukung Anies-Sandi. Proses dukungan Fuhabkepada Anies-Sandi karena adanya kedekatan ideology dan kedekatan basis massa Anies-Sandi. Keterlibatan Fuhabdalam Pilkada DKI Jakarta 2017 selain faktor ideologi Islam, Fuhabpun memberikan arahan terhadap masyarakat Jakarta dengan memberikan pandangan pentingnya memilih pemimpin Islam.

Faktor lain yang melatarbelakangi dukungan Fuhab kepada Anies-Sandi karena program Anies-Sandi berpihak kepada rakyat, yaitu program pemberhentian reklamasi (Rudi, 2017). Program pemberhentian reklamasi menjadi program unggulan Anies-Sandi dalam kampanye pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Selain itu Fuhabmelihat Anies-Sandi mempunyai *track record* bagus. Kemudian kandidat menjanjikan akan mendukung kegiatan Fuhab setelah terpilihnya nanti.

Program-program Anies-Sandi setelah menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mendukung program kegiatan ke Islaman yang dahulu dilarang oleh gubernur terdahulu seperti kembali membolehkan takbiran keliling dan kegiatan di Monas di buka kembali untuk kegiatan-kegiatan ke Islaman (Huda, 2017). Selain itu pula hubungan antara pemimpin dan ulama selalu dilakukan oleh Anies-Sandi terbukti selalu dibukakan keran dialog oleh Anies-Sandi pasca menjadi gubernur dan wakil gubernur (Erwanti, 2017). Dialog yang dilakukan tidak hanya terkait dengan masalah ke Islaman melainkan dengan berbagai masukan terkait DKI Jakarta. Program-program yang dilakukan Anies-Sandi ini merupakan bagian dari salah satu ajuan program *fuhab* kepada pemerintah DKI Jakarta.

Adanya keterlibatan *fuhab* dalam memenangkan Anies-Sandi pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 memang menjadi target yang dilakukan *fuhab* pada putaran kedua pasca putaran pertama. Dalam memenangkan Anies-Sandi, *fuhab* melakukan kunjungan yang masif ke pengurus tingkat kecamatan dan kepada para tokoh agama yang ada di daerah tersebut. Koordinasi yang dilakukan *fuhab* bertujuan untuk mengamankan kantong-kantong suara di bawah. Media yang digunakan *fuhab* untuk mengamankan suara tersebut yaitu *khutbah jum'at*, pengajian untuk memberikan pemahaman dalam memilih pemimpin menurut pandangan Islam. Layaknya *civil society fuhab* melakukan pengawasan jalannya pemilihan. *Fuhab* mengawal sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai organisasi masyarakat dan sebagai *civil society* agar pilgub DKI Jakarta berjalan lancar dan aman serta tidak ada kecurangan. Terlebih *fuhab* mendukung salah satu kandidat Anies-Sandi di putaran kedua.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.

Dalam penerapannya fuhab termotivasi bahwa pemimpin harus beragama Islam. Terlebih lagi ada amanat yang harus dijalankan dari seorang ulama yaitu dengan mengarahkan jamaah dan santrinya untuk memilih Anies-Sandi.

Kemandirian Organisasi fuhab layaknya organisasi yang lain Forum Ulama Habaib mempunyai visi dan misi yang jelas. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh fuhab para pengurus mengeluarkan anggaran pribadi. Organisasi fuhab merupakan organisasi yang bersifat otonom dan berdiri sendiri. Bantuan seperti Hibah merupakan bagian dari usaha untuk mendapatkan sebagaimana mestinya organisasi yang lain, karena setiap organisasi berhak mengajukan. Faktor kemandirian fuhab terletak pada rekrutmen Kyai dimana mereka sudah mempunyai jam terbang dalam organisasi dan fuhab memfasilitasi kegiatannya.

Fuhab sebagai *civil society* membuka akses masyarakat dengan pemerintah. Dalam setiap pengajian yang dilakasanakan fuhab, kegiatannya tidak hanya mengaji namun fuhab mengundang perwakilan pemerintahan. Tujuannya yaitu membuka akses masyarakat dan pemerintahan. Untuk membantu masyarakat fuhab mempunyai program, salah satunya akan bekerjasama dengan instatansi terkait. Kemandirian fuhab juga terlihat dari afiliasi jaringan politik. Secara organisasi fuhab tidak berafiliasi kepada partai manapun. Namun dapat juga individu pengurus ada yang berafiliasi kepada partai. Salah satunya ketua umum Fuhab yang berafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini *pertama,* latar belakang dukungan kepada Anies-Sandi dilandasi dengan faktor ideologi, ekonomi dan umat. Program Anies-Sandi berpihak kepada rakyat salah satunya memberhentikan reklamasi serta menjaga Jakarta agar tidak dipimpin oleh non-muslim. Menjaga agar Jakarta tidak dipimpin oleh selain non-muslim menjadikan kepentingan yang utama dalam mendukung Anies-Sandi. Kemudian menjaga Ideologi Islam dan mendorong kegiatan ke Islaman tetap dilaksanakan. *Kedua,* Dalam memenangkan Anies-Sandi arah politik fuhab dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 pada putaran pertama fuhab membebaskan memilih kepada Agus-Silvi dan Anies-Sandi dan pada putaran kedua sepenuhnya memilih kepada Anies-Sandi. Dalam hal ini juga fuhab melakukan koordinasi dengan melakukan kunjungan kepada pengurus Forum Ulama Habaib (FUHAB) di tingkat kecamatan untuk mengamankan suara ditingkat bawah. Forum Ulama Habaib (FUHAB) menggunakan media *ngaji, khutbah jum'at* untuk memberikan pemahaman tentang memilih pemimpin menurut Islam. Selain itu juga fuhab melakukan pengawalan di Tempat Pemungutan Suara. *Ketiga* Keterlibatan fuhab sebagai *civil society* dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu: (1) dalam penerapannya, fuhab termotivasi dengan perjuangan pemimpin Islam harus menang; (2) fuhab terlibat langsung dengan masyarakat untuk memberikan arahan. (3) memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; (4) dalam memberdayakan masyarakat fuhab melakukan pengawalan, memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan pemberdayaan kepada pengurus fuhab. *Keempat* kemandirian fuhab terlihat dari beberapa faktor yang tidak terlepas dari tujuan *civil society*, diantaranya: (1) Forum Ulama Habaib (FUHAB) mandiri dalam segi ekonomi dan fuhab mendapatkan dana Hibah dari pemerintah; (2) secara organisasi fuhab tidak terjaring dalam kelembagaan politik; (3) Forum Ulama Habaib (FUHAB) membuka akses masyarakat dengan pemerintah dengan mengundang perwakilan pemerintah dalam setiap pengajian yang dilakasanakan Fuhab; (4) Forum Ulama Habaib (FUHAB) memiliki kemandirian dan bersifat otonom.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini merupakan bagian dari Tesis yang diajukan kepada Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Penelitian dibiayai melalui Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Jakarta: Rajagrafindo.

Benditt, T. M. (1975). The Concept of Interest in Political Theory. *Sage Journals*, *Vol. 3*, *No*.

Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward consolidation*. *Baltimore: The Johns Hopkins University Press.*

Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA*. Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers.

Erwanti, M. O. (2017). Silaturahmi dengan Ulama, Anies Singgung Alexis hingga Diamond. *Detik.Com*. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3726123/silaturahmi-dengan-ulama-anies-singgung-alexis-hingga-diamond

Fadli, H. A. (2011). *Ulama Betawi (Studi tentang Jaringan Ulama Betawi dan Kontribusinya terhadap perkembangan Islam Abad ke-19*. Jakarta Pusat.

Faridl, M. (2001). Kyai di antara Peran Agama dan Partisipasi Politik: Dilema Sejarah dan Pencarian Identitas. *Journal Mimbar Pendidikan*, *No. 4/XX*.

Herdiansah, A. G. (2017). POLITISASI IDENTITAS DALAM KOMPETISI PEMILU DI INDONESIA PASCA 2014. *Jurnal Bawaslu.* Vol. 3 No.2: 177

Heywood, A. (2014). *Politik Edisi Ke 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hikam, M. A. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Pustaka LP3S Indonesia.

Huda, L. (2017). Anies Akan Memberlakukan Lagi 3 Kebijakan yang Dilarang Ahok. *Metro.Tempo.Co*. Retrieved from https://metro.tempo.co/read/869046/anies-akan-memberlakukan-lagi-3-kebijakan-yang-dilarang-ahok/full&view=ok

Jati, W. R. (2013). ULAMA DAN PESANTREN DALAM DINAMIKA POLITIK DAN KULTUR NAHDLATUL ULAMA. *Jurusan Politik Dan Pemerintahan FISIPOL UGM*, 16.

Kariyadi, S., & Samadhi, W. P. (2008). *Blok Politik Demokratik, Panduan Pelatihan,*. Jakarta: Demos.

Lutz, Georg, Mach, André, & Primavesi, R. . (2018). Interest Group Support and Electoral Success in the Swiss Elections of 2015. A Candidate Survey Analysis. *Swiss Political Science Review*.

Mulkhan, A. M. (2009). *Politik Santri : Cara Merebut Hati Rakyat*. Yogyakarta : Kanisius.

Naik, S. B. (2016). Political Party–Interest Group Relationship A Study In Uttar Kannada District Karnataka State. *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, *Vol. 21*(10), 13–19.

Nawab, M. (2009). The Ulama in Pakistani Politics. *Journal of South Asian Studies*, No. 133: 1.

Orjuela, C. (2003). Building Peace in Sri Lanka: A Role for Civil Society. *Journal of Peace Research*. Vol. 40 : 1

Perdana, A. (2009). Dinamika Politik Lokal di Indonesia. In *CIVIL SOCIETY DAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRATISASI di INDONESIA*.

Putra, R. I. (2017). Usul Forum Ulama dan Habaib Jakarta ke Sandiaga Uno. *Liputan6.Com*. Retrieved from liputan6.com/news/read/3211100/usul-forum-ulama-dan-habaib-jakarta-ke-sandiaga-uno

Ramadlan, M. F. S. (2018). MARKETING ISU AGAMA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA 2015-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, *vol 15*.

Ridhoi, M. A. (2017). Forum Ulama dan Habib DKI Jakarta Dukung Penuh Anies-Sandi. *Tirto.Id*. Retrieved from https://tirto.id/forum-ulama-dan-habib-dki-jakarta-dukung-penuh-anies-sandi-cjAT

Rudi, A. (2017). Janji Non-program Anies-Sandi: Hentikan Reklamasi hingga Tutup Alexis. *Hmegapolitan.Kompas.Com*. Retrieved from https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/20/08363321/janji.non-program.anies-sandi.hentikan.reklamasi.hingga.tutup.alexis?page=all

Saidi, H. (2016). KIAI DAN POLITIK: MENGINTIP MOTIF KIAI NU (NAHDLATUL ULAMA) DALAM PEMILU 2009 DI GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *Vol. X*, *No*.

Sartori, G. (1984). *Parties and Party Systems*. New York: Cambridge University Press.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitaif, dan R&D*. Bandung: Bandung: Alfabeta.

Suharko. (2005). Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Tata Pemerintahan yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 8. No. 3: 273

W.Foley, V. A. M. (2003). *The Civil Society Reader*. University Press of New England.

Wafa, M. dhuha A. (2012). Peran Politik Kiyai Di Kabupaten Rembang Dalam Pemilu Tahun 1994-2009. *Journal Sejarah*, Vol. 1 No. 1: 64

Zamroni, I. (2007). Juragan, Kiai dan Politik di Madura. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. XXX. No. 65: 264

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.